

Implementasi Kesetaraan Gender Dan Pemanfaatan Teknologi (Aplikasi Lapor) Bagi *Digital Society* Di Ruang Lingkup Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Banyuasin III, Kelurahan Pangkalan Balai

Faila Sufa Marhamah ^{a*}, M.Febrianza ^b, Marleni ^c, Putriyanti ^d

^{a,b} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

^{c,d} Program Studi Ilmu Komunikasi, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

ABSTRACT

This Community Service Journal aims to describe the implementation of gender equality within the scope of Banyuasin Regency, Banyuasin III District, Pangkalan Balai Village. The topic of gender equality was chosen based on direct observations in the field and is an interesting topic because issues regarding gender are currently being widely discussed everywhere, be it on social media, mass media and other media. The research method uses qualitative research methods with data collection techniques, namely through observation, in-depth interviews and documentation, while data analysis techniques use taxonomic data analysis techniques. The implementation of gender equality in this research has not yet been fully realized due to several factors, including a lack of budget, inadequate community resources and the government's role which is still not very big on issues regarding gender equality.

ABSTRAK

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai implementasi kesetaraan gender yang ada di ruang lingkup Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Banyuasin III, Kelurahan Pangkalan Balai. Topik mengenai kesetaraan gender dipilih berdasarkan observasi langsung ke lapangan dan menjadi topik yang menarik dikarenakan isu mengenai gender dewasa ini sedang banyak diperbincangkan di manapun, baik itu di social media, media massa dan media lainnya. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, sementara teknik analisis data menggunakan teknik analisis data taksonomi. Implementasi kesetaraan gender pada penelitian ini masih belum cukup terealisasi dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor yaitu antara lain kurangnya anggaran, sumber daya masyarakat yang kurang memadai serta peran pemerintah yang masih belum terlalu besar terhadap isu mengenai kesetaraan gender.

ARTICLE HISTORY

Received 2 November 2023

Accepted 28 February 2024

Published 23 March 2024

KEYWORDS

Gender; Gender equality; Digital Society.

KATA KUNCI

Gender; Kesetaraan Gender; Digital Society.

1. Pendahuluan

Isu Kesetaraan Gender merupakan salah satu isu yang esensial di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan karena pandangan baku laki-laki dan perempuan dalam kaitan dengan peran gender. Isu Ketimpangan Gender tersebut antara lain menyangkut relasi antara laki-laki dan perempuan, adanya ketimpangan kondisi seperti perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara laki-laki dan perempuan. Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan seperti diskriminasi, marginalisasi, subordinasi. Pembahasan mengenai gender telah menjadi bahasan analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan sosial dan juga menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai pembangunan. Gender dipersoalkan karena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, hak dan fungsi serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut akhirnya membuat masyarakat cenderung diskriminatif dan pilih-pilih perlakuan terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan dan diskriminasi itu terjadi hampir di semua bidang. Mulai dari tingkat internasional, negara, keagamaan, sosial, budaya, ekonomi, bahkan sampai tingkatan rumah tangga. Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki kesadaran penuh mengenai isu kesetaraan gender yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan adanya instruksi dari Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Selain itu sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia, K. H. Ma'ruf Amin yaitu: 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berspektif gender, 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak, 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4) Penurunan pekerja anak, 5) Pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Dalam rangka menerapkan keadilan dan kesetaraan gender maka diperlukan suatu upaya yang besar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai keadilan dan kesetaraan gender, sehingga tidak terjadi berbagai ketimpangan yang dikarenakan oleh masalah-masalah struktural serta nilai sosial budaya yang sedari dulu telah ada serta berkembang dapat segera diatasi. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu cara untuk mencapai suatu keadilan gender yaitu antara lain mengenai partisipasi seimbang, kesempatan dan pelibatan dalam mengambil sebuah keputusan serta keterjangkauan manfaat bagi kesejahteraan dan pembangunan yang sama dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu jika sebuah keadilan gender dapat terpenuhi, maka selanjutnya akan tercapaileh sebuah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang akhirnya memiliki posisi dan status yang setara. Berdasarkan 17 poin penting SDG (*Sustainable Development Goals*) atau yang lebih dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kesetaraan gender berada pada urutan ke-5 yang harus diterapkan di dalam masyarakat untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu penelitian ini menarik untuk dikaji lebih dalam sebagai bentuk perwujudan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG (*Sustainable Development Goals*).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Istilah penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong: 1999) mendefinisikan "metode kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung ke lapangan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik Analisis

Taksonomi. Menurut Bungin (2010: 206), secara keseluruhan Teknik ini menggunakan “pendekatan non kontras antar elemen”. Menurut Dadang H. Purnama (2004: 80), Teknik analisis taksonomi digunakan apabila peneliti ingin mendapatkan hasil analisis yang terfokus pada domain tertentu, kemudian memilih domain tertentu menjadi sub-sub domain serta bagian-bagian khusus dan terperinci. Teknik ini dilakukan dengan cara:

- 1) Mencari informasi atau fakta di lapangan secara langsung
- 2) Memfokuskan pada satu permasalahan
- 3) Menganalisis permasalahan secara mendalam sehingga didapatkan hasil yang objektif dan terperinci.

Tabel 1. Analisis Taksonomi tentang Implementasi Kesetaraan Gender Dan Pemanfaatan Teknologi (Aplikasi Lapor) Bagi Digital Society Di Ruang Lingkup Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Banyuasin III, Kelurahan Pangkalan Balai

Domain	Sub-sub Domain
Implementasi Kesetaraan Gender Dan Pemanfaatan Teknologi (Aplikasi Lapor) Bagi Digital Society Di Ruang Lingkup Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Banyuasin III, Kelurahan Pangkalan Balai	<p>Konsep dasar mengenai gender dan kesetaraan gender</p> <p>Implementasi kesetaraan gender di wilayah Kabupaten Banyuasin (Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan di Kelurahan Pangkalan Balai)</p> <p>Pemanfaatan Teknologi (Aplikasi Lapor) bagi <i>Digital Society</i></p>

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian Gender dan Kesetaraan Gender

Istilah gender berasal dari Bahasa Inggris yaitu “gender”. Istilah tersebut pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (dalam Suharjuddin: 2020) yang bertujuan untuk memisahkan pencirian manusia berdasarkan pada pendefinisiannya yang bersifat sosial budaya, dengan pendefinisiannya yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Selain itu pengertian gender menurut Aan Oakley (dalam Suharjuddin: 2020) yaitu sebagai atribut atau kontruksi sosial yang dikenakan pada manusia dan dibentuk oleh kebudayaan manusia. Oakley juga menuturkan bahwa dalam sex, gender and society juga berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat dari Tuhan. Gender adalah perbedaan yaitu antara perempuan dan laki-laki yang terbentuk berdasarkan aspek sosial serta kultur dan berkaitan dengan sifat, perilaku, peran yang dianggap layak bagi perempuan dan laki-laki dan dapat dipertukarkan atau berubah sewaktu-waktu. Gender tidak sama dengan jenis kelamin (seks). Gender dapat diartikan sebagai pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi budaya dan social yakni perbedaan yang bukan merupakan ketentuan dari Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Jenis kelamin (seks) mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian reproduksi. Dengan demikian, gender merupakan rekayasa social, bukan kodrat, dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung waktu dan budaya setempat, sedangkan jenis kelamin (seks) merupakan ciptaan Tuhan, kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan universal sampai kapanpun.

Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Adanya ketidaksetaraan gender disebabkan oleh kuatnya pandangan dari masyarakat mengenai anak laki-laki dan perempuan memiliki nilai yang berbeda di sebagian besar masyarakat. Anak laki-laki lebih dianggap

penting dibandingkan anak perempuan. Selain itu anak laki-laki juga diharapkan menjadi pemimpin keluarga dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya secara finansial (Saguni dalam Subagja, 2022). Bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam masyarakat beberapa antara lain pelabelan (*stereotype*) pada perempuan sebagai makhluk yang lemah, diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, subordinasi (penomorduaan), marginalisasi (pemunggiran terhadap perempuan), beban ganda dan kekerasan. Akibat dari beberapa bentuk ketidaksetaraan gender tersebut di masyarakat akhirnya melahirkan banyak permasalahan. Maka dari itu isu kesetaraan gender merupakan salah satu poin penting di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dirancang oleh PBB dalam 17 target tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkaitan dengan usaha suatu bangsa untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kesejahteraan akan tercapai apabila seluruh masyarakat baik itu laki-laki atau perempuan dapat menikmati hasilnya. Isu mengenai gender dalam pembangunan pada dasarnya adalah kerjasama dalam proses pembangunan. Isu gender menjadi suatu ketimpangan apabila dalam pembangunan perempuan hanya dijadikan sebuah objek. Kenyataannya, perempuan dan laki-laki sebenarnya memiliki kemampuan yang satu sama lain saling menghasilkan (Suharjuddin: 2020).

3.2 Implementasi Kesetaraan Gender di Wilayah Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin berdasarkan Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 47 Tahun 2021 tentang Nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah pada sub urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati. Beberapa fungsi pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota.
- 3) Penyiapan forum koordinasi pelaksanaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 4) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, social, politik hukum dan kualitas keluarga.
- 5) Penguatan dan pengembangan pelembagaan perlindungan perempuan, perlindungan hak anak, dan pengarusutamaan gender pada Lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kota.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh Instansi/Badan Usaha karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja Instansi/Badan Usaha tersebut. Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin, memiliki sumber Daya Manusia pada tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin

Nomor	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	1	1	7	3	12
3	D3	-	5	2	4	11
4	S1	3	12	9	11	35
5	S2	4	8	-	-	12
6	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	8	26	18	18	70

Dari data pada tabel di atas, kondisi pegawai perangkat daerah didominasi oleh perempuan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, namun di setiap latar belakang pendidikan terdapat peningkatan bahwa pendidikan tinggi sudah didominasi oleh perempuan daripada laki-laki.

Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas P2PAP2KB

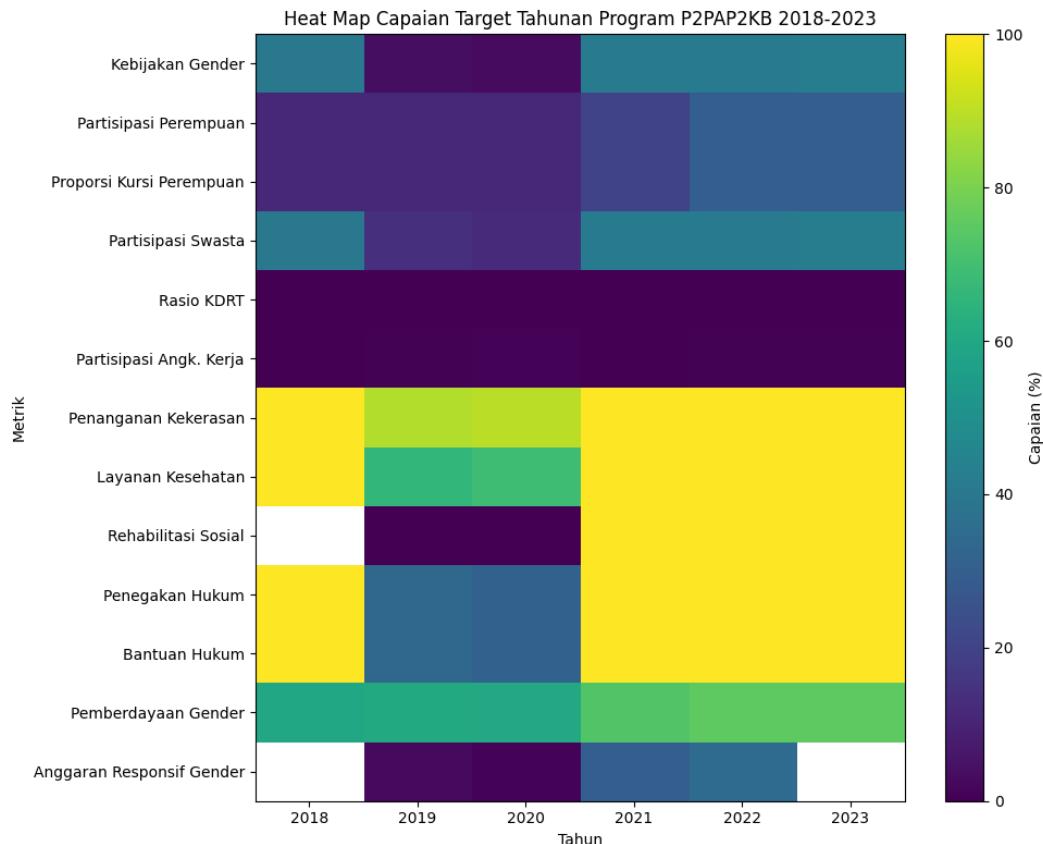
Nomor	Golongan	Jumlah PNS		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II/a	-	1	1
2	II/b	-	-	-
3	II/c	-	-	-
4	II/d	-	1	1
5	III/a	1	3	4
6	III/b	1	1	2
7	III/c	2	3	5
8	III/d	4	10	14
9	IV/a	2	4	6
10	IV/b	-	1	1
11	IV/c	-	-	-
12	IV/d	-	-	-
13	IV/e	-	-	-
	Jumlah	10	24	34

Dari data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah PNS berdasarkan golongan bawah sampai dengan golongan tertinggi lebih didominasi oleh perempuan daripada laki-laki. Data tersebut berdasarkan data yang tertera di renstra Dinas P2PAP2KB tahun 2021. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuasin telah mengagendakan beberapa Program Pembangunan Pelayanan berupa rencana program/kegiatan indikatif untuk periode 2018-2013 yang berhubungan dengan kesetaraan gender yaitu antara lain:

- 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - a) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b) Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik.

- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
 - a) Peningkatan Peranan Perempuan dalam Pembangunan
 - b) Pembinaan kelompok kerja pengarusutamaan gender (pokja PUG dan Focal Point)
 - c) Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan PUG
 - d) Pendampingan penyusunan program PPRG bagi focal point di OPD Kabupaten Banyuasin
 - e) Pembinaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)
- 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
 - a) Pembinaan desa Prima
 - b) Peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban kekerasan/KDRT
 - c) Pembentukan forum peningkatan produktivitas ekonomi perempuan
- 4) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 - a) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
 - b) Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha
 - c) Penyuluhan gerakan terpadu tindak pidana perdagangan orang (GT-TPPO)
 - d) Pelatihan pemberdayaan ekonomi kreatif bagi kelompok usaha perempuan
 - e) Bimbingan etika pergaulan bagi perempuan
 - f) Bimbingan bagi pengurus dan anggota DWP kabupaten dan kecamatan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga
 - g) Pembinaan hukum tentang KDRT
 - h) Pelatihan peluang usaha bidang pangan
 - i) Pembinaan Hukum dan Pencegahan KDRT dan Penilaian Rumah Cinta
 - j) Pencegahan Traficking dan Pornoaksi-Pornografi

Beberapa program di atas yang berhubungan kesetaraan gender merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap Badan, Dinas dan Lembaga Teknik Daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan. Berdasarkan beberapa program-program di atas yang berhubungan dengan kesetaraan gender maka mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas P2PAP2KB tahun 2018-2023, berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Gambar 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P2PAP2KB Tahun 2018-2023

Berdasarkan data pada tabel di atas mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P2PAP2KB Tahun 2018-2023 terjadi peningkatan dan penurunan dalam persentase realisasi dalam lima tahun terakhir seperti yang tertera pada tabel. Indikator cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu mengalami kenaikan realisasi persentase yang stabil hingga 100% dimulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Indikator Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR dalam lima tahun terakhir juga semakin meningkat dimulai dari 11,00% sampai dengan 30,00%. Selain program-program yang sudah tertera pada pembahasan sebelumnya, di Dinas P2PAP2KB juga terdapat ruangan yang mendukung kesetaraan gender, dapat dilihat dari foto-foto berikut ini:



Gambar 2. Tempat wudhu yang dipisah antara laki-laki dan perempuan



Gambar 3. Toilet Laki-Laki



Gambar 4. Toilet Perempuan

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa fasilitas tempat wudhu antara laki-laki dan perempuan sudah dipisah sehingga memudahkan laki-laki dan perempuan untuk beribadah. Selanjutnya toilet laki-laki dan perempuan juga dipisah sehingga tidak akan terjadi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Hak dan fasilitas yang sama dapat dirasakan oleh laki-laki dan perempuan ketika berada di Dinas P2PAP2KB. Berbicara mengenai kesetaraan gender di lingkungan Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin, kepemimpinan pada Dinas P2PAP2KB Kabupaten Banyuasin pada masa sekarang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berjenis kelamin perempuan yaitu Ibu Dra. Yosi Zartini, MM. Hal ini dapat dikaitkan dengan isu kesetaraan gender yang terjadi di masyarakat bahwa perempuan masih dianggap dibawah laki-laki dalam pekerjaan dan tidak bisa memimpin namun dalam hal ini di Kabupaten Banyuasin hal tersebut tidak valid dikarenakan sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas P2PAP2KB justru dipimpin oleh seorang wanita. Hal ini membuktikan bahwa perempuan juga mampu menduduki atau mendapatkan jabatan yang sama selayaknya laki-laki sehingga dapat membuktikan bahwa perempuan juga dapat menghilangkan stigma yang ada pada masyarakat dewasa ini.

3.3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Pangkalan Balai

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan. Secara umum, masyarakat di Indonesia tentunya tidak asing lagi dengan sebutan ibu-ibu PKK. Istilah ini sudah begitu luas dan biasanya diasosiasikan dengan perkumpulan ibu-ibu yang memiliki berbagai kegiatan positif. Kegiatan tersebut mulai dari kegiatan pelatihan UKM (Usaha Kecil Menengah), pengajian, sampai dengan seminar-seminar kecil mengenai kesehatan reproduksi, KB (Keluarga Berencana), KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dan kesehatan anak. Namun kenyataannya, gerakan inilah yang sampai sekarang memiliki andil besar yang secara pragmatis mampu membantu masyarakat terutama dalam hal keluarga, perempuan dan anak. Hal ini sejalan dengan nama PKK yang mempunyai kepanjangan yaitu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. PKK adalah gerakan yang hampir selalu dianggap sebagai gerakan yang hanya bisa dianggotai perempuan. Padahal sejatinya, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tidak selalu harus dianggotai kaum hawa saja. Dikarenakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan yang sifatnya pragmatis, ia tidak lepas dari berbagai fungsi yang disematkan. Berikut ini adalah 10 fungsi dasar (program pokok) dari PKK, yakni:

- 1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- 2) Gotong Royong
- 3) Pangan
- 4) Sandang
- 5) Perumahan serta Tatalaksana Rumah Tangga
- 6) Pendidikan serta Keterampilan
- 7) Kesehatan
- 8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

- 9) Kelestarian Lingkungan Hidup
- 10) Perencanaan Sehat

Adapun kegiatan PKK adalah menggerakkan dan membina masyarakat untuk melaksanakan 10 program pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Tim Penggerak PKK berada di tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan, PKK dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak PKK yang diketuai oleh isteri Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah), secara fungsional. Dapat dikemukakan bahwa kunci berkembangnya program dan kegiatan PKK, justru ada peran nyata diwujudkan oleh istri Pimpinan Daerah.

Dalam mewujudkan pengabdian kepada masyarakat, peneliti melakukan seminar bersama mahasiswa KKN Stisipol Candradimuka Palembang yang melibatkan Tim Penggerak PKK di Kelurahan Pangkalan Balai. Seminar tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2023 bertempat di KPU Pangkalan Balai. Adapun tema dari seminar tersebut adalah mengenai kesetaraan gender dan berjudul “Peningkatan Kesadaran tentang Kesetaraan Gender dan Sosialisasi Aplikasi LAPOR di Lingkungan Masyarakat”. Mengangkat tema kesetaraan gender dan mensosialisasikan aplikasi LAPOR kepada Tim Penggerak PKK Kelurahan Pangkalan Balai merupakan suatu hal yang sangat menarik dikarenakan hal ini menjadi pengalaman pertama bagi ibu-ibu Tim Penggerak PKK tersebut. Hal ini diungkapkan oleh salah satu dari anggota Tim PKK tersebut dalam sesi tanya jawab bahwa ia merasa tertarik dengan tema yang diangkat pada saat seminar berlangsung. Tim Penggerak PKK Kelurahan Pangkalan Balai ini dapat dikatakan sebagai Tim Penggerak PKK yang aktif, hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran anggota yang cukup banyak serta antusias mereka terhadap tema seminar dengan diwakili oleh berbagai macam pertanyaan yang dilontarkan pada saat sesi tanya jawab berlangsung.

PKK merupakan salah satu bentuk dari kesetaraan gender dikarenakan anggota dari Tim Penggerak PKK notabene adalah kaum hawa yang memiliki 10 program pokok yang akan diimplementasikannya kepada masyarakat. Anggota yang terlibat dalam Tim Penggerak PKK bukan hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga saja, namun banyak juga yang mempunyai tugas ganda. Di satu pihak ia bertanggungjawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya. Di lain pihak ia juga mempunyai tanggungjawab sosial mewujudkan pembangunan sebagai mitra pemerintah. Maka dari itu PKK untuk menilai keberhasilan pembinaan keluarga erat kaitannya dengan keberhasilan peran perempuan. Tidak terkecuali keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD di dalamnya ada keterlibatan perempuan sebagai istri memberi semangat suami, maupun melalui program PKK yang bersinergis dengan program OPD terkait. Tentunya sesuai tujuan gerakan PKK, yakni memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

3.4 Aplikasi LAPOR

Digital Society atau masyarakat digital dewasa ini sudah tidak asing lagi dengan berbagai macam aplikasi di era digital ini. Berbagai aplikasi dapat diunggah secara bebas dan cepat melalui akses internet yang semakin canggih dewasa ini. Akses internet yang cepat dan mudah sudah dapat dinikmati oleh masyarakat dari usia dini hingga usia dewasa. Pemerintah Indonesia juga memanfaatkan akses internet dalam hal pelayanan publik. Hal ini difungsikan agar masyarakat di Indonesia dapat mengakses pelayanan publik secara online dan diharapkan dapat mempermudah membantu masyarakat dalam menghadapi keluhannya kepada pemerintah. Salah satu dari akses pelayanan publik

secara online adalah aplikasi mengenai pengaduan pelayanan publik. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam *good governance* maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional.

Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015. SP4N-LAPOR! dibentuk untuk merealisasikan kebijakan *“no wrong door policy”* yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganiinya. SP4N-LAPOR! telah terhubung dengan 34 Kementerian, 96 Lembaga, dan 493 Pemerintah daerah di Indonesia.

Dibuatnya aplikasi SP4N yaitu untuk mewujudkan: 1) Penyelenggara dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik; 2) Penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan; dan 3) Meningkatkan kualitas pelayanan publik (Sumber: www.lapor.go.id). Isu-isu dan permasalahan mengenai kesetaraan gender dewasa ini menimbulkan banyak konflik di masyarakat, namun dengan adanya aplikasi pengaduan yang merupakan fasilitas dan wadah dari pemerintah kepada masyarakat, diharapkan dapat sangat membantu segala permasalahan yang terjadi khususnya permasalahan mengenai kesetaraan gender.

Aplikasi LAPOR ini dapat diunggah oleh siapapun dan dimanapun selagi mempunyai akses internet yang memadai. Adapun langkah-langkah untuk mengakses aplikasi ini yakni antara lain:

a) Menulis Laporan

Menulis laporan yang akan dikirim ke aplikasi LAPOR itu harus sesuai dengan keluhan dan yang ingin diproses. Dalam hal ini berbicara mengenai kesetaraan gender, maka dapat memilih mengenai Kesetaraan Gender dan Sosial Inklusif, Kekerasan di lokasi tempat pelapor berada. Di aplikasi tersebut akan tertera mengenai instansi yang dituju serta lokasi dan waktu kejadian pengaduan yang akan dilaporkan.

b) Proses Verifikasi

Dalam proses verifikasi ini dibutuhkan waktu selama tiga hari untuk selanjutnya laporan tersebut diteruskan kepada instansi yang terkait dengan pengaduan yang dibuat.

c) Proses Tindak Lanjut

Proses ini memerlukan waktu selama lima hari, selama itu juga instansi akan menindaklanjuti dan membalas laporan yang dibuat.

d) Beri Tanggapan

Selanjutnya masyarakat yang melapor dapat menanggapi balasan dalam jangka waktu selama 10 hari.

e) Selesai

Langkah terakhir yaitu laporan akan ditindaklanjuti hingga akhirnya dinyatakan selesai.

Melalui lima langkah-langkah yang sudah disebutkan diatas, pemerintah dalam hal ini yang berhubungan dengan pelayanan publik berharap dapat membantu untuk mempermudah masyarakat menyelesaikan masalah dan pengaduan yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi dan akses digital. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk datang langsung ke instansi yang dituju dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah akses pelayanan publik di Indonesia terutama mengenai permasalahan kesetaraan gender yang dapat dilaporkan salah satunya ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Kesimpulan

Dalam praktek di lapangan dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Pangkalan Balai mempunyai Tim Penggerak PKK yang aktif dan hal ini mendukung kesetaraan gender. Saat diadakan seminar pun ibu-ibu PKK terlihat antusias dengan tema yang diangkat yaitu mengenai kesetaraan gender. Akan tetapi di Kelurahan Pangkalan Balai belum sepenuhnya terealisasi untuk mencapai kesetaraan gender dikarenakan faktor anggaran yang kurang, SDM yang masih belum memadai serta sarana prasarana yang ada di Kelurahan Pangkalan Balai belum mendukung kesetaraan gender. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa gambar di bawah ini mengenai kondisi di lapangan Kantor Kelurahan Pangkalan Balai.



Gambar 5. Tampak Depan Kantor Lurah



Gambar 6. Tampak Depan Kantor Lurah



Gambar 7. Tampak Samping Kantor Lurah terdapat tulisan 10 tugas pokok PKK



Gambar 8. Kondisi toilet

Beberapa foto yang terlampir di atas adalah bukti fisik bahwa di Kantor Kelurahan Pangkalan Balai belum sepenuhnya menerapkan kesetaraan gender dikarenakan kurangnya fasilitas serta sarana dan prasarana yang ada, namun adanya Tim Penggerak PKK Kelurahan Pangkalan Balai yang jumlahnya cukup banyak dan aktif itu cukup membuktikan bahwa Kelurahan Pangkalan Balai juga masih mendukung kesetaraan gender walaupun belum terlalu maksimal.

Tabel 4. Pendataan Sarana Dan Prasarana Di Dinas P2PAP2KB Dan Kelurahan Pangkalan Balai Yang Responsif Gender

No.	Instansi/Tempat	Sarana dan Prasarana Responsif Gender	Ada	Tidak Ada
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ruang Laktasi Tempat Bermain Anak Fasilitas untuk Difabel Toilet Terpisah Laki-laki dan Perempuan Tempat Wudhu Terpisah Laki-laki dan Perempuan Perpustakaan/Ruang Baca Loket Layanan Dan Ruang Tunggu Prioritas Bagi Ibu Hamil Dan Lansia	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
2.	Kelurahan Pangkalan Balai	Ruang Laktasi Tempat Bermain Anak Fasilitas untuk Difabel Toilet Terpisah Laki-laki dan Perempuan Tempat Wudhu Terpisah Laki-laki dan Perempuan Perpustakaan/Ruang Baca Loket Layanan Dan Ruang Tunggu Prioritas Bagi Ibu Hamil Dan Lansia	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	

Dari data pada tabel di atas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memang sudah ada beberapa poin yang masuk ke dalam pengimplementasian kesetaraan gender yaitu toilet yang dipisah antara laki-laki dan perempuan serta tempat wudhu yang juga terpisah antara laki-laki dan perempuan. Di Dinas P2PAP2KB juga dipimpin oleh seorang perempuan sebagai Kepala Dinasnya sementara di Kelurahan dipimpin oleh seorang laki-laki. Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar pemerintah Kabupaten Banyuasin nanti lebih berperan di kemudian hari agar lebih responsif mengenai kesetaraan gender dengan memberikan fasilitas yang cukup memadai serta meningkatkan anggaran yang cukup untuk mendukung kesetaraan gender tersebut dikarenakan kesetaraan gender adalah poin ke-5 yang terdapat dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.

Referensi

- Azisah, S., Mustari, A., Masse, A., Kara, S. A., Babcock, T., Dzuhayatin, R., ... & Juharuddin, W. (2016). Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya. *Makassar: Seri Kemitraan Universitas Masyrakat*.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nuraeni, Y., & Suryono, I. L. (2021). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Bidang Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 68-79.
- Purnama, D. H. (2004). Modul ajar metode penelitian kualitatif. *Palembang. UNSRI*.
- Subagja, Y. H. (2022). Perspektif Kesetaraan Gender pada Tenaga Kerja Wanita di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2(4), 513-520.
- Suharjuddin, S. (2020). Kesetaraan Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya: CV. *Pena Persada*.
- Supriyadi. (Februari, 2021). Pengertian, Tugas dan Fungsi PKK. Diunduh dari <https://tanjungmeru.kec-kutowinangun.kebumenkab.go.id/index.php/web/artikel/165/190/> pada tanggal 17 Agustus 2023.